

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

SKRIPSI



Oleh

**APRINI AULIA AMRI
105730536815**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh
APRINI AULIA AMRI
105730536815

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin, atas perjuanganku menggapai sepenggal keberhasilan, namun apa yang kuperoleh selama ini adalah berkat karunia-Mu ya Allah. Semoga rahmat dan hidayah-Mu, menyertai langkahku, dan tiada harapan yang ku pinta kecuali ridho-Mu ya Allah. Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku Ayahanda tercinta (Ahmad Dua Pasau) dan Ibunda tersayang (Ariyanti Malik) serta adik-adikku Astiwi, Amelia dan Agung serta orang terkasih dan sahabat-sahabatku yang semuanya selalu memotivasi dalam meraih keberhasilan dan memberikan kebahagiaan kepadaku. Semoga Allah SWT membalas pahala yang berlipat ganda.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Aprini Aulia Amri, NIM : 105730536815, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H

24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
 2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak (.....)
 3. Saida Said, SE., MM (.....)
 4. Muh. Nur R, SE., MM (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba"

Nama Mahasiswa : Aprini Aulia Amri
No. Stambuk/NIM : 105730536815
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Ansvarif Khalid, SE., M.Si, AK,CA
NIDN: 0916096601

Pembimbing II

Samsul Rizal, SE., MM
NIDN: 0907-28401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi,



Dr. Ismail Baddi Jaha, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprini Aulia Amri
 Stambuk : 105730536815
 Program Studi : Akuntansi
 Dengan Judul : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil fipaken dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Menyatakan Pernyataan



[Signature]
Aulia Amri

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi,



[Signature]
Ismail Rusyong, SE., MM
NBM: 993078

[Signature]
Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., GA., CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam taklupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Ahmad Dua Pasau dan Ibu Ariyanti Malik. Yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi,SE.,M.SI.,AK.,CA., C.SP. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, S.E.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Samsul Riza, S.E.,MM selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahifisabilillahfastabiqulhairat, Wassalamualaikum Wr.Wb



Makassar, 2019

Aprini Aulia Amri

ABSTRAK

APRINI AULIA AMRI, 2019. **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ansyarif Khalid dan Pembimbing II Samsul Rizal

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Data yang diolah adalah hasil dari kuesioner yang dibagikan pada responden pada kantor Badan Pendapatan Daerah Bulukumba. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah membandingkan seberapa besar pengaruh dan signifikansi pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil dari kuesioner tersebut telah diuji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dan hipotesis kedua diterima karena pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Pemerintah hendaknya memperhatikan dan menggunakan faktor-faktor dalam menentukan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern guna untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci : **Teknologi, Sistem dan Kinerja Instansi.**

ABSTRACT

*ApriniAuliaAmri, 2019. **Effects of Utilization of Information Technology and Internal Control on the Performance of Government Agencies in the Office of the Regional Revenue Agency of Bulukumba**, Thesis of the Faculty of Economics and Business, Accounting Department, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Ansyarif Khalid and Advisor II Samsul Rizal*

This study aims to determine the effect of the use of information technology and internal control on the performance of government agencies. The type of research used in research is a quantitative method that emphasizes the analysis of numerical data (numbers) processed by statistical methods. The processed data is the result of the questionnaire distributed to the respondent at the office of the Bulukumba Regional Revenue Agency. The calculation technique used in the study is to compare how much influence and significance the use of information technology and control of the performance of government agencies. The results of the questionnaire have been tested for validity and reliability. Data analysis method uses multiple regression techniques.

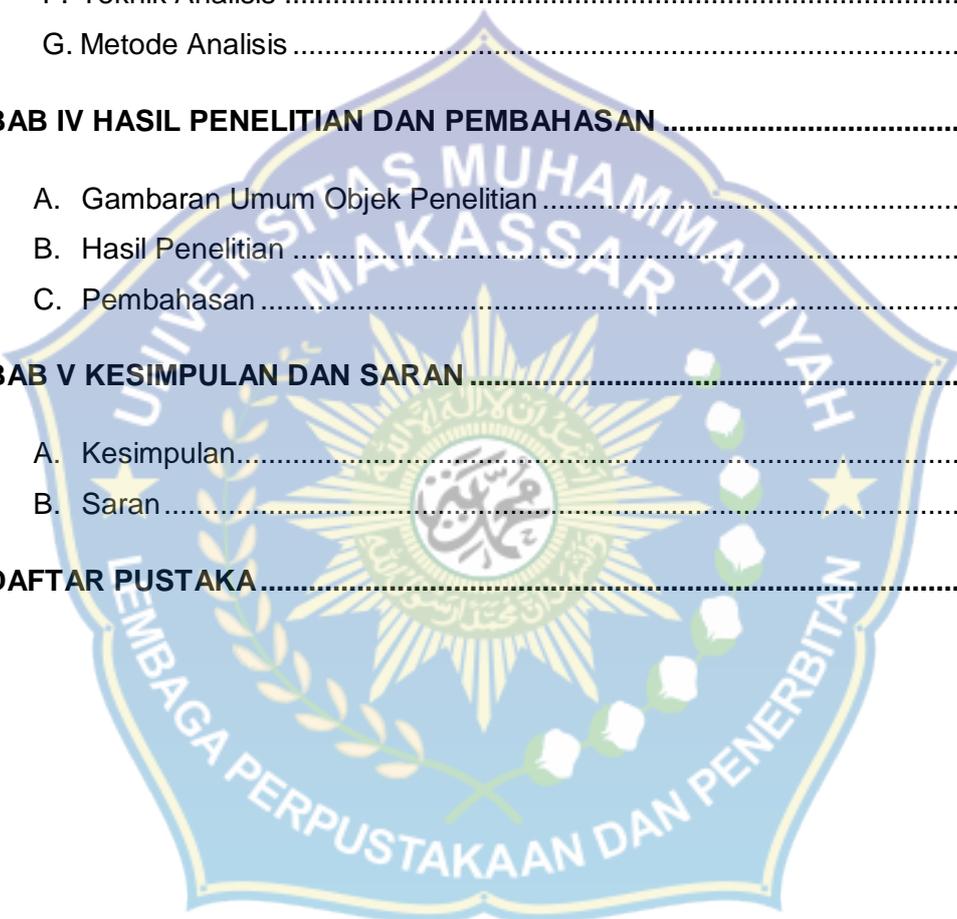
Based on the results of the study it was proved that the first hypothesis was rejected because the use of information technology did not affect the performance of government agencies and the second hypothesis was accepted because internal control had a positive and significant effect on the performance of government agencies. The government should pay attention and use factors in determining policies regarding the use of information technology and internal control to improve the performance of government agencies.

Keywords: *Technology, Systems and Performance of Government Agencies.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENRSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Konsep	22
D. Hipotesis Penelitian	23

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	24
D. Populasi dan Sampel	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis	26
G. Metode Analisis	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman	
2.1 Penelitian Terdahulu	18
4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	42
4.2 Jenis Kelamin Responden	42
4.3 Pendidikan Responden	43
4.4 Masa Kerja	43
4.5 Hasil Uji Validitas Variabel X1	45
4.6 Hasil Uji Validitas Variabel X2	45
4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Y	46
4.8 Hasil Uji Reliabilitas	47
4.9 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)	48
4.10 Hasil Pengujian Secara Simultan	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konsep	22
4.1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
2. Lampiran 2 Matriks Tabulasi Data
3. Lampiran 3 Olah Data SPSS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari terbitnya Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 /2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelola Keuangan Negara, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggung jawab. Sebab, apabila dikelola secara baik dan bertanggungjawab, organisasi publik tersebut akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada *value for money* (*effectivity, efficiency, economy*) (Mardiasmo, 2005:127). Praktik pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No.28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi hal di atas maka dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang mewajibkan seluruh instansipemerintahan menyusun perencanaan

strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi kemudahan bagi manajemen dalam instansi pemerintahan dalam menciptakan, menjalankan dan mengawasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat pada saat ini. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi (Oktari, 2011).

Faktor yang lain yang juga mempengaruhi kinerja organisasi adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal di dalam suatu organisasi mempunyai peran penting juga untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan dapat mendorong kinerja

organisasi semakin menurun. Disisi lain kualitas pengendalian internal juga bisa mewujudkan kemandirian dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut mulai dari tingkatan kepemimpinan organisasi hingga pegawai di tingkat paling bawah (Yuda, 2012). PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pasal 1 menyatakan: Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kedua variabel diatas sangat erat kaitannya dalam menentukan tinggi rendahnya kinerja sebuah organisasi. Pencapaian kinerja yang maksimal akan menggambarkan sejauh mana visi, misi, target maupun sasaran dari organisasi dapat terwujud yang keseluruhannya tertuang ke dalam strategic planning suatu organisasi. Termasuk organisasi pemerintah yang sejak memasuki era reformasi ini, sangat dituntut agar semua lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, harus mampu mewujudkan kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan proposal ini penulis memilih judul sebagai berikut ” **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi pembandingan untuk membandingkan teori dan fakta.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana pengungkapan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau acuan untuk menindak lanjuti penelitian-penelitian serupa dan menambah kajian pustaka di bidang sistem informasi akuntansi.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Kinerja

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Saat ini kinerja pemerintah lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang diperoleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Setiap instansi atau perusahaan menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terdiri dari elemen para pelaku/pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sendiri-sendiri maupun berkelompok dengan tujuan untuk efisiensi dan optimalisasi pencapaian tujuan yang akan dicapai. Para pegawai yang bekerja sangat mempengaruhi kerja suatu instansi, hal ini karena pegawai merupakan penggerak utama bagi setiap kegiatan operasional dan sangat berperan aktif untuk tercapai atau tidaknya suatu tujuan instansi. Berikut beberapa pengertian mengenai kinerja menurut para ahli diantaranya :

Menurut Edison (2016) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mangkunegara (2009) dalam jurnal Setyowati&Haryani (2016) mengemukakan bahwa istilah kinerja dari kata *Job performance* atau *actual performace* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Kinerja menjadi cermin kemampuan dan keterampilannya dalam pekerjaan tertentu yang akan berdampak pada *reward* dari perusahaan. Menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Menurut Mathis dan Jackson dalam Donni Juni Priansa (2014:269) mengatakan bahwa “Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya”.

Menurut Benardin dan Russel dalam Donni Juni Priansa (2014:270), mengatakan bahwa “Kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu, yang memperlihatkan kaulalitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang pegawai di dalam pekerjaannya, yang didalamnya terlihat bagaimana kualitas dan kuantitas seorang pegawai dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

a. Pengukuran Kinerja Instansi

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang ditetapkan.

b. Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi

yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Mardiasmo (2002-a:21) dalam Legina (2008) mengemukakan kinerja program berhubungan dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Dalam kenyataan, indikator yang dapat dengan tepat diidentifikasi hanyalah input dan output, sedangkan indikator yang lain lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2011:274). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam

rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Nordiawan, 2010:158).

Praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah di Indonesia telah dilakukan setelah dikeluarkannya instruksi presiden No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Instruksi ini menugaskan kepada para pimpinan instansi pemerintah merumuskan suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahapan sebagai :

- 1) Penetapan rencana strategik,
- 2) Pengukuran kinerja,
- 3) Pelaporan kinerja,
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

2. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintah seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (Supada, 2010).

Menurut O'Brien dalam wijana teknologi adalah suatu jaringan komputer yang berdir atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data dan teknologi jaringan informasi. Menurut Aji dalam Wijaya informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi.

Teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah dan menjadi informasi yang bermanfaat.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*) perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet*, *intranet*), *electric commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya.

- 1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali *et al* 2002). Mustafa *et al* (2010) secara umum menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari:

- 1) Pemanfaatan perangkat informasi meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan)

- 2) Pemrosesan dan penyimpanan (pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan serta sistematis dan menyeluruh)
- 3) Perawatan (adanya jadwal pemeliharaan perangkat teknologi informasi secara teratur guna mendukung kelancaran pekerjaan)

Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya,

- 1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar layanan publik dapat di akses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (dalam Winidyaningrum *et al* 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan maupun personel lainnya dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatnya kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya

- 1) Pengelolahan data, pengelolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.

- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini.

3. Sistem Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar dengan pencapaian tujuan kategori yaitu:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi
- b. Keandalan laporan keuangan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Moeller, 2009:32).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan adopsi dari COSO dengan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintah Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 definisi sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Novianty (2004 dalam Widyaningrum *et al* 2010), pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kekurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi yang menjadi tidak kompeten. Selain itu menurut Indasari *et al* (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Sistem pengendalian intern menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid.

Menurut Afrianti (2011) pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan

keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua (Bastian 2011-204), yaitu:

a. Pengendalian intern akuntansi (*accounting internal control*)

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

b. Pengendalian intern administratif (*internal administrative control*)

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Menurut Wilkinson *et al.* (2000) dalam Indriasari dan Ertambang (2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah:

- a. Perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang bernomor
- b. Pemisahan tugas
- c. Otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi

- d. Pemeriksaan independen atas kinerja
- e. Penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat

COSO mengidentifikasi sistem pengendalian internal yang efektif meliputi lima komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, prosedur yang merefleksikan seluruh sikap manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas yang mencakup:

- 1) Integritas dan nilai etika (*integrity and etichal values*)
- 2) Komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*)
- 3) Dewan komisaris atau komite audit (*board of directors or audit committe*)
- 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen (*manajemnt's philosophy andoperating style*)
- 5) Struktur organisasi (*organization structure*)
- 6) Pemberian otoritas dan tanggung jawab (*assignmentof authority and responsibility*)
- 7) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia (*human resource policies and practices*)

b. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Penilaian resiko dalam sistem pengendalian intern adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko

yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumentasi dan catatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

d. Informasi dan komunikasi (*information dan communication*)

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi yang harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan dan ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtarkan.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan kegiatan pengendalian intern secara periodik harus dipantau oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Dalam PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN DAN VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
1.	Irine `Chintya (2015)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah	Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Pengumpulan data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang	Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar, 3,676 dengan signifikansi 0,001 ($\alpha=0,05$). Sistem Pengendalian

			ditunjukkan kepada responden yaitu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan subbagian keuangan	Intern Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan koefisiensi regresi 1,792 dan signifikansi 0,049 (alpha, 0,05).
2.	Iktria Susanti (2014)	Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi	Pengumpulan data digunakan dengan metode kuesioner. Kuesioner penelitian diadopsi dan dikembangkan atas kuesioner yang telah digunakan penelitian-penelitian terdahulu. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 52 kuesioner (jumlah dinas sebanyak 26 dikalikan dengan jumlah kuesioner yang diberikan untuk tiap-tiap dinas sebanyak 2 kuesioner)	(1) <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,272 dengan signifikansi 0,007 (alpha 0,05); (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi dengan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,123 dengan signifikansi 0,018 (alpha 0,05) dan (3) Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi dengan nilai efisiensi regresi sebesar 0,174 dengan signifikansi 0,009 (alpha 0,05).
3.	Argo Trihapso ro (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Pemerintah	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey, dimana alat pengumpulan data yang pokok dari sumber primer yaitu	Kualitas sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif

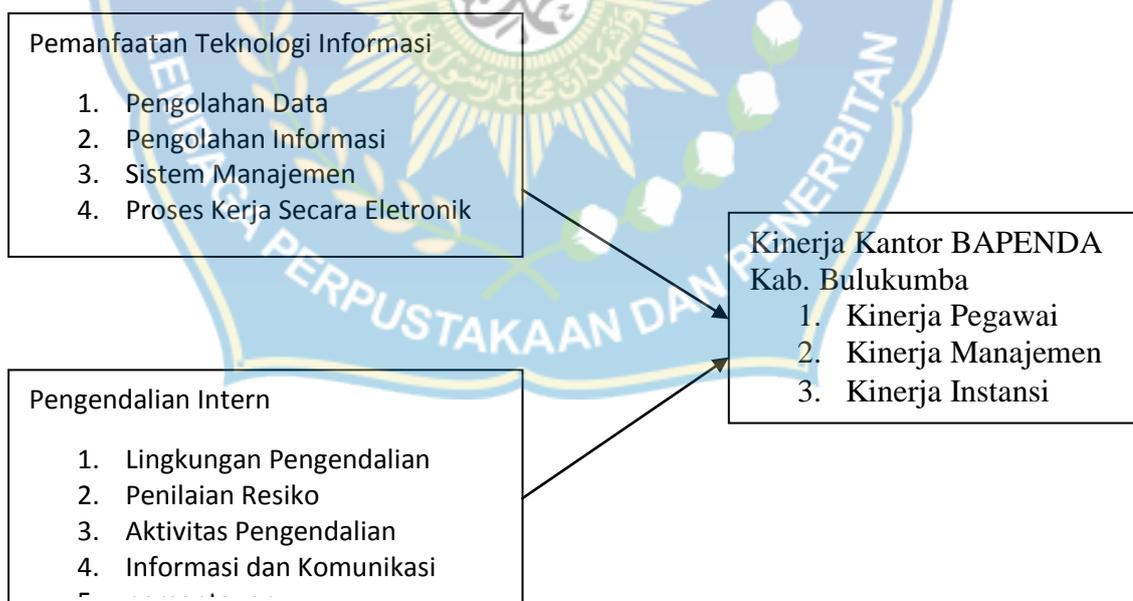
		terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	kuesioner.	terhadap kinerja pemerintah daerah (KPD).
4.	Kadek Chendi Antasari dan Pt D'yan Yaniartha S, (2015)	Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi pada Kinerja Individual dengan Kepuasan Kerja Individual dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel efektivitas sistem informasi akuntansi diukur dengan mengadopsi pertanyaan kuesioner dari Aditya (2013). Variabel teknologi informasi diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Adinata (2011) dengan beberapa perbaikan. Variabel Kepuasan Kerja diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Aditya (2013) yang diperbaiki sesuai kebutuhan penelitian. Variabel kinerja individual diukur dengan mengadopsi pertanyaan kuesioner dari Aditya (2013).	Berpengaruh positif memoderasi pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi pada kinerja individual, dan kepuasan kerja tidak memoderasi pengaruh hubungan penggunaan teknologi informasi pada kinerja individual.
5.	Adif Putra Zodia (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan penelitian. Jenis data penelitian ini bersumber dari jawaban responden atas daftar pernyataan yang berhubungan	Pengaruh teknologi informasi tidak berpengaruh pada kinerja SKPD. Sedangkan sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

			dengan variabel yang akan diteliti yang terdapat pada kuesioner yang diberikan kepada responden	
6.	Shinta Permata Sari dan Banu Witono (2014)	Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah di Tinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKAD di wilayah Eks karesidenan surakarta terutama pegawai bidang akuntansi, anggaran dan aset sejumlah 290 karyawan. Terkait pengambilan sampel dilakukan dengan convenience sampling.	Sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.
7.	Riska Fahrul Razi (2017)	Pengaruh Ketaatan terhadap peraturan perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti.	Koefisien R square adalah 82,9%. setiap variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik. sedangkan sisanya jika dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi tidak dimasukkan dalam penelitian ini. semua variabel juga memiliki hubungan yang kuat dengan variabel tanggungan dalam pencarian ini.
8.	Egrinaen Mauliziska Nugrahe	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah,	Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey.	Kompetensi reformasi pemerintah daerah mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah.

ni Putri (2015)	Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Karena metode survey merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang menggunakan kuesioner pada 39 SKPD di pemerintah kota pekan baru dan data sekunder yang diperoleh dari referensi, buku, internet atau data instansi terkait.	aplikasi akuntabilitas keuangan mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah daerah. Terhadap pemerintah daerah.
--------------------	---	---	---

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka konsep tersebut, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

H2: Pengendalian Intern menunjukkan pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Eksplanatori. Penelitian Eksplanatori adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

eksplanatori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan obyek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba yang beralamat jalan Jendral Sudirman No.03 Bulukumba. Sedangkan waktu penelitian ini selama 2 bulan.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel sebagai berikut :

1. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kinerja instansi pemerintah

2. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala likert menggunakan lima angka penelitian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah sub bagian/pegawai pada unit kerja yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Bulukumba yang berjumlah kurang lebih 30 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang di teliti). Untuk keperluan analisis, peneliti menentukan jumlah responden minimal sebanyak 30 responden dengan pertimbangan jumlah data yang diperlukan untuk proses analisis menggunakan SPSS adalah minimal 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi agar sasaran penulis dapat dicapai adalah:

1. Observasi yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada lokasi penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data di lapangan.
2. Kuesioner (Daftar Pertanyaan), yaitu suatu cara pengumpulan data melalui daftar pernyataan yang telah penulis siapkan yang disebarakan data yang tersedia yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang ada.

F. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan komputer melalui aplikasi SPSS. Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| Y | = Kinerja Instansi Pemerintah |
| A | = Konstanta |
| X1 | = Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| X2 | = Sistem Pengendalian Intern |
| β_{1-2} | = Koefisien Regresi |
| ε | = Standar error |

G. Metode Analisis

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang ada (disusun) valid atau tidak (Ghozali, 2002). Hasil pengujian validitas ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Dengan kata lain suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas bertujuan untuk melihat ketepatan instrumen pengukuran dalam penelitian. Pengujian ini untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian agar dapat memberikan informasi yang akurat tentang hal yang diukur.

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel melalui program SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Teknik yang digunakan untuk pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kuesfisien korelasi *product moment pearson* dengan menggunakan SPSS versi 24.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan data yang dinyatakan valid. Pengujian bertujuan mengetahui seberapa jauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah tetap

konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Teknik yang digunakan untuk pengujian reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Teknik ini dikembangkan oleh *Cronbach* untuk menghasilkan korelasi reliabilitas alpha, dan merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antara item-item yang terpopuler serta menunjukkan indeks konsistensi yang sempurna. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai *Alpha Cronbach* $> 0,6$.

2. Pengujian Hipotesa

1. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Nilai t tabel, yang diperoleh dibandingkan nilai t *hitung*, bila t *hitung* lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent berpengaruh pada variabel dependent.

Kriteria pengujian :

- Apabila nilai t *hitung* $<$ t tabel, maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependent secara signifikan

- Apabila nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

2. Uji R^2

R^2 adalah perbandingan antara variasi yang dijelaskan oleh X_1 dan X_2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y . Jika selain X_1 dan X_2 semua variabel diluar model yang diwadahi dalam e dimasukkan ke dalam model, maka nilai R^2 akan bernilai 1. Ini berarti nilai seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan kedalam model. Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R^2 untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. Untuk data survey yang berarti bersifat *cross section* data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai $R^2 = 0,2$ atau $0,3$ sudah cukup baik. Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R^2 cenderung semakin kecil. Sebaiknya dalam data runtun waktu (*time series*) dimana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada suatu unit analisis (perusahaan atau negara) pada beberapa tahun maka R^2 cenderung besar, hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja (Gujarati, 1995:75).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan unsur pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba resmi berdiri menjadi Badan, Bapenda yang sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, namun dipisah dikarenakan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah maka dilakukan pemekaran menjadi dua SKPD yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk

membangun daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba

2. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

“Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif”.

2. Misi

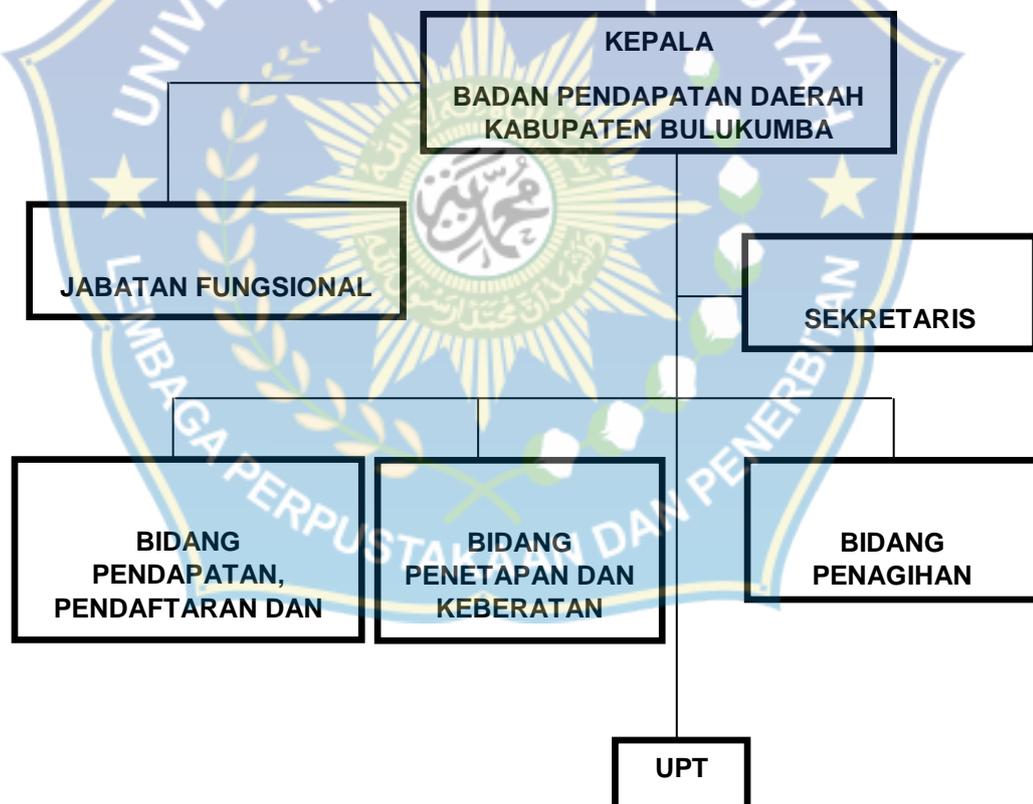
Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% pertahun total pendapatan daerah sekitar 10% pertahun.
- b. Meningkatkan Kapasitas, Efektivitas, dan Efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan Daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan manajemen.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

3. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi maka struktur organisasi sangat penting karena struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

b. Job Description

1. Kepala Badan

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah,
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah,
- c. Menyelenggarakan urusan Badan Pendapatan Daerah,
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah,
- e. Mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah,
- f. Menyelenggarakan urusan umum Badan Pendapatan Daerah,
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah,
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka terciptanya keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah,
- i. Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan,

- j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan,
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan dan penyusun program serta dalam kegiatan kesekretariatan,
- b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan,
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan,
- d. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan perlengkapan,
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan melakukan, mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
- f. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah,

- h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset, serta pelaksanaan urusan perlengkapan,
 - i. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset,
 - j. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
 - k. Menginventarisir permasalahan dan penyiapan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya,
 - l. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP),
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
3. Bidang Penagihan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan,
 - b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan,
 - c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan,
 - d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan,

- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penagihan,
 - f. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya,
 - g. Menyusun laporan realisasi tugas PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pajak daerah lainnya,
 - h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA),
 - i. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
 - j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Penetapan dan Keberatan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang penetapan dan keberatan,
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan,
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan,
 - d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan,
 - e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan dan keberatan,

- f. Melaksanakan perhitungan penetapan dan keberatan,
- g. Melaksanakan proses perhitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan,
- h. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD,SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya,
- i. Melaksanakan porporasi benda berharga BPHTB dan pajak daerah lainnya,
- j. Merumuskan penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan,
- k. Mendiskusikan SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya,
- l. Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya,
- m. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA),
- n. Merumuskan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP),
- o. Merumuskan penyusunan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM),
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi,
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan,
 - d. Memeriksa bahan perumusan dan pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi,
 - e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan, pendaftaran, dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi,
 - f. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD pajak bumi bangunan (PBB),
 - g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA),
 - h. Melaporkan hasil penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA),
 - i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
 - j. Menyusun hasil pelaksanaan tugas,

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian variabel (x1) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- b. Hasil penelitian variabel (x2) Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
 - Sebelum adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Instansi Pemerintah tentu sistem yang dipakai secara manual yang dimana memakan waktu yang relatif lebih lama dalam pemrosesan data pelayanan kepada masyarakat, informasi yang disediakan hanya pada jam kerja saja pada saat di bukanya kantor pemerintahan.

Setelah adanya Pemanfaatan teknologi Informasi sangat membantu dalam memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas yang harus dikerjakan, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Walaupun demikian Pemanfaatan Teknologi Informasi

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Kantor BAPENDA Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

- Sebelum adanya Pengendalian Intern yang baik pada Instansi Pemerintah yaitu kemungkinan terdapatnya kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja) sehingga pelaporan keuangan daerah tidak memenuhi nilai keterandalan karena pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak valid.

Setelah adanya Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah dengan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya masalah mengenai dikeluarkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi

manajemen dalam instansi pemerintah dalam menciptakan, menjalankan dan mengawasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Organisasi adalah sistem pengendalian internal. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pasal 1 menyatakan: Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua faktor inilah yang penulis teliti untuk mengetahui pengaruh dua faktor tersebut terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan Metode Analisis Regresi Berganda dengan Uji Validitas dan Reliabilitas Data dan Uji F, Uji t dan Uji R^2 .

Berikut Deskriptif Data dan hasil penelitian dari olahan data dari SPSS 24.

1. Deskriptif Data Penelitian dan Responden

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diberikan langsung kepada responden dalam bentuk kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 33 kuesioner. Dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 33 dan dapat diolah sebanyak 33 kuesiner.

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Penyebaran Kuesioner	33
Kuesioner yang kembali	33
Kuesioner yang dapat diolah	33
Tingkat Pengembalian	100%

Sumber : Hasil Penelitian diolah, 2019

Data sebelumnya dapat dilihat bahwa dari 33 kuesioner yang disebarakan yang kembali sebanyak 33 kuesioner. Tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 100% dari total kuesioner. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner yang sangat tinggi karena peneliti mendatangi langsung Kantor Badan Pendapatan Daerah Bulukumba dalam melakukan penyebaran kuesioner.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Absolut	Persentase
Laki-laki	15	45%
Perempuan	18	55%
Jumlah	33	100%

Sumber : Hasil Penelitian diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 18 atau sebesar 55%, sedangkan sisanya sebanyak 15 atau sebesar 45% dipenuhi oleh jenis kelamin laki-laki.

Artinya sebagian besar responden yang mengisi kuesioner adalah perempuan.

Tabel 4.3
Pendidikan Responden

Pendidikan	Absolut	Persentase
SLTA/ Sederajat	11	33%
D3	3	9%
S1	17	52%
S2	2	6%
S3	0	0
Jumlah	33	100%

Sumber : Hasil penelitian diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir terbesar pada responden yang berpendidikan terakhir dengan kategori sarjana strata satu (S1) sebanyak 17 orang atau sebesar 52%, SLTA/Sederajat sebanyak 11 orang atau sebesar 33%, Diploma (D3) sebanyak 3 orang atau sebesar 9% dan strata dua (S2) sebanyak 2 orang atau sebesar 6%.



Tabel 4.4
Masa Kerja

Lama Bekerja	Absolut	Persentase
1 -3 Tahun	10	30%
4 – 6 Tahun	8	24%
7 – 9 Tahun	0	0
> 9 Tahun	15	46%
Jumlah	33	100%

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan lama kerja adalah diatas 9 tahun 15 orang atau sebesar 46%, 1-3 tahun 10 orang atau sbesar 30%, sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau sebesar 24%.

2. Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada dalam kuesioner mampu mengukur perubahan yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2001). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antara sekor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu tentukan hipotesis H_0 dan H_1 , kemudian uji dengan membandingkan r

hitung (tabel *corrected item-item correlation*) dengan r tabel (tabel *product moment* dengan signifikan 0,05) untuk mencari r tabel maka dengan rumus $r \text{ tabel} = \frac{1}{\sqrt{n}}$ $= \frac{1}{\sqrt{33}} = 0,344$ yang dapat dilihat pada tabel distribusi nilai r tabel dengan signifikansi 5%. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila r hitung > dari r tabel (Ghozali, 2001:45). Hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

pertanyaan	Variabel	r hitung	r tabel	kesimpulan
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,608	0,344	Valid
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,456	0,344	Valid
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,532	0,344	Valid
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,546	0,344	Valid
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,425	0,344	Valid
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,377	0,344	Valid
7	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,767	0,344	Valid
8	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,411	0,344	Valid

Sumber : Hasil penelitian diolah,2019

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X2)

pertanyaan	Variabel	r hitung	r tabel	kesimpulan
1	Pengendalian Intern	0,673	0,344	Valid
2	Pengendalian Intern	0,731	0,344	Valid
3	Pengendalian Intern	0,781	0,344	Valid
4	Pengendalian Intern	0,66	0,344	Valid
5	Pengendalian Intern	0,526	0,344	Valid
6	Pengendalian Intern	0,372	0,344	Valid
7	Pengendalian Intern	0,372	0,344	Valid
8	Pengendalian Intern	0,573	0,344	Valid
9	Pengendalian Intern	0,657	0,344	Valid
10	Pengendalian Intern	0,582	0,344	Valid
11	Pengendalian Intern	0,397	0,344	Valid
12	Pengendalian Intern	0,608	0,344	Valid

Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2019

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

pertanyaan	Variabel	r hitung	r tabel	kesimpulan
1	Kinerja Instansi Pemerintah	0,844	0,344	Valid
2	Kinerja Instansi Pemerintah	0,678	0,344	Valid
3	Kinerja Instansi Pemerintah	0,75	0,344	Valid
4	Kinerja Instansi Pemerintah	0,457	0,344	Valid
5	Kinerja Instansi Pemerintah	0,355	0,344	Valid
6	Kinerja Instansi Pemerintah	0,733	0,344	Valid

Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 dan 4.7 tersebut menjelaskan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemngendalian Intern memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan n 33 (angka 33 karena jumlah responden adalah 33), maka r tabel pada X1 dan X2 sebesar 0,344. Hal ini berarti bahwa nilai *pearson correlation* lebih besar dari r tabel maka semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pernyataan yang diberikan. Hasil dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian Reliabilitas ini menggunakan metode statistik *cronbach alpha* dengan signifikan yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,6 maka item pernyataan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka item pernyataan tersebut tidak *reliable* (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2001:42)

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	<i>Cronbach Alpha</i>
Pemanfaatan Teknologi Informasi	8 Item	0,619
Pengendalian Intern	12 Item	0,811
Kinerja Instansi Pemerintah	6 Item	0,727

Hasil penelitian diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel penelitian adalah *reliable*, karena α hitung $> 0,6$. Pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki α hitung $0,619 > 0,6$ dan variabel Pengendalian Intern memiliki α hitung $0,811 > 0,6$ sedangkan variabel Kinerja Instansi Pemerintah memiliki α hitung $0,727 > 0,6$

4. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji serta menganalisis Rumusan hipotesis berdasarkan struktur model. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 33 responden pada BAPENDA Kabupaten Bulukumba, diperoleh informasi tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (x_1), Pengendalian Intern (X_2) dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada hasil analisis regresi dari data.

a. Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas antara variabel independen

(X1), (X2), dan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan variabel

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji T-test)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

$$t \text{ tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 30) = 2,042$$

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	11,070	4,845		2,285	,030
	PTI (X1)	-,158	,111	-,210	-1,432	,163
	PI (X2)	,326	,079	,604	4,110	,000

a. Dependent Variable: KIP (Y)

Berdasarkan uji t diatas diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,163 > 0,05 dan nilai t hitung -1,423 < t tabel 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang

berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Sedangkan pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < \text{dari } 0,05$ dan $t \text{ hitung } 4,110 > t \text{ tabel } 2,042$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

c. Uji R²

R² adalah perbandingan antara variasi yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y.

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Secara Simultan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,607 ^a	,369	,327	1,70447

a. Predictors: (Constant), PI (X2), PTI (X1)

Berdasarkan pengujian secara simultan R Square adalah 0,369. Maka dapat disimpulkan besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap Y secara simultan adalah 36.9% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 63.1%

C. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis regresi linear berganda dan uji R^2 untuk memperoleh perbandingan antara variasi yang dijelaskan oleh X_1 dan X_2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y . Terdapat 2 hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, maka hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil penelitian yang dilakukan telah terbukti bahwa hipotesis pertama ditolak dikarenakan besarnya t hitung sebesar $-1,432 < t$ tabel $2,042$ dengan signifikansi $0,163 > 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Ini berarti Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka hipotesis pertama ditolak. Ini berarti bahwa hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak searah dengan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dimiliki Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba maka tidak berpengaruh dengan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 149 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di daerah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta kemudahan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan publik. Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur jaringan dan komputer
- b. Penyediaan dan pengembangan aplikasi
- c. Pengaturan data dan informasi
- d. Tanda tangan elektronik
- e. Pengembangan sumber daya manusia
- f. Kelembagaan
- g. Kerja sama dengan instansi
- h. Keamanan informasi
- i. Pemeliharaan dan pelaporan
- j. Pembinaan dan pengawasan, dan
- k. Pembiayaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adif Putra Zodia, (2015) dan Egrinaen Mauliziske Nugraheni Putri, (2015) dengan hasil penelitian menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Hipotesis Kedua: Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, telah terbukti bahwa hipotesis Kedua diterima dikarenakan besarnya t hitung sebesar $4,110 > t$ tabel $2,042$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka hipotesis kedua diterima. Ini berarti bahwa

hubungan Pengendalian Intern searah dengan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pengendalian Intern yang dimiliki kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba maka akan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dalam paturan Bupati Bulukumba Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kabupaten Bulukumba, pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bulukumba, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba wajib menerapkan SPIP.
2. SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur:
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian/identifikasi Resiko

- c. Kegiatan pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan pengendalian intern
3. Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 4. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irene Chintya, (2015) dan Iktria, (2014) dengan hasil penelitian menemukan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Target Kinerja atau Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Adapun tujuan penyusunan perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 adalah untuk:

1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan sipervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja Pegawai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul, kemudian diolah mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pernyataan yang terdapat dalam Rumusan Masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji statistik, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, maka hipotesis pertama ditolak.
2. Berdasarkan uji statistik, Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, maka hipotesis kedua diterima.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar memperluas variabel Independen yang akan diteliti misalnya menambah variabel sumber daya manusia, kepuasan kerja.
2. Bagi Instansi Pemerintah khususnya Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Penulis menyarankan hendaknya memperhatikan dan menggunakan faktor-faktor dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pemerintahan seperti pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern agar meningkatkan Kinerja dimasa akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. (2005). *akuntansi sektor publik, edisi 11*. yogyakarta: andi.
- Mahsu, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaili, A. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- Oktari, A. N. (2011). Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- Oktari, Ranti. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi, Universitas Riau: Pekan baru
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- Putri, G. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Razi, R. F. (2017). Pengaruh Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *JOM Fekon Vol.4 No.1 (februari) 2017* , 1268.

Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susanti, I. (2014). Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi.

Trihapsoro, A. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Witono, S. P. (2014). Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Yaniarta, K. C. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi.

Yoda, Prima. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi. *Skripsi*, Universitas Siliwangi: Tasikmalaya.

Zodia, A. P. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

L

A



M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

LAMPIRAN KUESIONER

A. Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Bulukumba.**

B. Identitas Responden

- Nama Responden : (Boleh dirahasiakan)
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Usia :
- Pendidikan Terakhir : SLTA/ Sederajat
 Diploma (D3)
 Strata 1 (Sarjana)
 Strata 2 (Master)
 Strata 3 (Doktor)
- Lama Bekerja : 1 – 3 Tahun
 4 – 6 Tahun
 7 – 9 Tahun
 9 Tahun

C. Pernyataan

1. Kinerja Istansi Pemerintah

Bagian ini untuk mengukur kinerja instansi yang Bapak/Ibu/Saudari tempati. Dalam menjawab pernyataan bagian ini Bapak/Ibu diminta untuk menyesuaikan jawabannya dengan luas kewenangan dan tanggung jawab Bapak/Ibu ketersediaan informasi pada unit/sub unit Bapak/Ibu dan besarnya perhatian organisasi kepada Bapak/Ibu. Penjelasannya sebagai berikut :

1 = Sangat Jauh Dibawah Rata-Rata

2 = Dibawah Rata-Rata

3 = Rata-Rata

4 = Diatas Rata-Rata

5 = Sangat Jauh Diatas Rata-Rata

Pernyataan	Skor				
	1	2	3	4	5
Kinerja Pegawai a. Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan : penilaian pegawai, penilaian catatan, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan					

b. Menentukan tujuan, kebijakan, dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, merancang prosedur pemrograman.					
Kinerja Manajemen					
a. ukar Menukar Informasi dengan orang bagian organisasi lain untuk mengaitkan dan menyesuaikan program, memberitahu organisasi lain					
b. Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan Bapak/Ibu : Membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas pekerjaan dan menangani keluhan					
c. Mempertahankan angkatan kerja dibagian Bapak/Ibu : Merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, mempromosikan dan memutasi pegawai					
Kinerja Instansi					
a. Kinerja instansi secara menyeluruh					

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jawaban atas pernyataan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi. Mohon Anda menjawab pernyataan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu angka, dari angka 1 hingga 5.

Skala nomor menunjukkan seberapa dekat jawaban anda dengan kedua pilihan yang tersedia. Penjelasan sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Pernyataan	Skor				
	1	2	3	4	5
Pengolahan Data 1. Dalam melaksanakan tugas subbagian keuangan dan non-keuangan memiliki komputer yang cukup.					
2. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
Pengolahan Informasi 1. Jaringan internet terpasang di unit kerja secara Local Area Network (LAN) atau Wide Area Network (WAN).					
2. Jaringan Internet terpasang dan dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam mengirim data dan informasi yang dibutuhkan.					
Sistem Manajemen 1. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
2. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi diharapkan koordinasi antar unit dalam organisasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sehingga kinerja organisasi secara umum dapat meningkat					
Proses Kerja Secara Elektronik 1. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
2. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang					

terintegrasi					
--------------	--	--	--	--	--



3. Sistem Pengendalian Intern

Jawaban atas pernyataan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan sistem pengendalian intern. Mohon Anda menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu angka, dari angka 1 hingga 5. Skala nomor menunjukkan seberapa dekat jawaban Anda dengan kedua pilihan yang tersedia. Penjelasan sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Pernyataan	Skor				
	1	2	3	4	5
Lingkungan Pengendalian					
1. Auditor internal memiliki standar perilaku dan etika yang memadai					
2. Kepala Auditor Internal selalu memberikan pengarahan kepada para auditor internal					
3. Telah ada prosedur penugasan yang terintegrasi dari seluruh aktivitas pekerjaan SPI					
4. Struktur SPI sudah mencakup kerangka kerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam mencapai tujuan					
Penilaian Resiko					
1. SPI sudah memiliki prosedur penilaian resiko yang berfungsi memengaruhi tujuan SPI					
2. Penerapan pengendalian memberikan dampak positif bagi seluruh komponen BAPENDA					

<p>Aktivitas Pengendalian</p> <p>c. Aktivitas pengendalian yang dilakukan telah mendukung struktur pengendalian dalam mendukung tujuan BAPENDA</p>					
<p>d. SPI sudah mempunyai kebijakan dan prosedur yang dapat membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan dalam menghadapi risiko yang akan memengaruhi pencapaian misinya</p>					
<p>Informasi dan Komunikasi</p> <p>1. Informasi yang diperlukan telah dikomunikasikan ke seluruh elemen unit untuk membantu pekerjaan masing-masing elemen tersebut</p>					
<p>2. Saluran komunikasi yang dimiliki meliputi orang-orang yang berada didalam unit maupun orang-orang yang berada di luar unit</p>					
<p>Pemantauan</p> <p>a. Sudah tersedia prosedur kegiatan pemantauan yang efektif atas pelaksanaan pengendalian intern, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus</p>					
<p>b. Sudah tersedia sistem dokumentasi yang berbentuk formal atas prosedur pemantauan</p>					

Lampiran 2 : Matriks Tabulasi Data

No	Pemanfaatan Teknologi Informasi								Total	Sistem Pengendalian Intern												Total	Kinerja Instansi Pemerintah						Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X3.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3.5	Y3.6	Y
1	4	5	3	5	5	4	2	4	32	2	2	4	4	5	5	5	4	4	2	4	5	46	3	4	4	4	3	4	22
2	3	4	4	3	4	3	3	4	28	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	54	4	4	4	4	4	5	25
3	3	4	4	3	4	3	3	4	28	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	54	4	4	4	4	4	5	25
4	3	4	4	3	4	3	3	4	28	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	52	4	4	4	4	4	5	25
5	3	4	4	3	4	5	3	4	30	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	51	4	4	4	4	4	5	25
6	3	4	4	3	4	5	3	4	30	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	52	4	4	4	4	4	5	25
7	3	4	4	3	4	5	3	4	30	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	52	4	4	4	4	4	5	25
8	3	4	4	3	4	5	3	4	30	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	52	4	4	4	4	4	5	25
9	5	4	4	3	4	4	5	5	34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	4	3	4	4	3	4	22
10	4	2	5	4	4	4	2	4	29	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	48	4	3	5	4	3	5	24
11	3	4	4	3	4	5	3	4	30	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	52	4	4	4	4	4	5	25
12	5	5	5	3	4	5	5	5	37	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	51	4	4	4	4	4	4	24
13	4	5	5	5	5	5	5	5	39	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	3	4	23
14	4	5	4	3	5	4	3	3	31	4	3	4	3	4	4	4	3	5	5	5	5	49	3	4	2	4	3	4	20
15	5	4	5	4	4	4	4	2	32	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	45	3	3	3	3	3	3	18
16	4	4	4	3	4	4	4	4	31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46	3	4	3	3	4	4	22
17	3	4	4	3	4	4	4	5	31	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	43	3	3	3	3	3	3	18
18	5	5	4	4	5	4	5	5	37	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	52	4	4	3	4	4	4	23
19	4	3	4	5	4	4	5	4	33	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	48	3	3	3	3	3	4	19
20	4	4	5	5	4	4	5	5	36	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	3	2	44	4	3	3	5	5	3	23
21	4	4	5	5	4	5	5	3	35	4	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3	2	45	3	3	3	5	5	3	22
22	4	4	5	5	5	4	5	4	36	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	58	4	3	4	4	4	4	23
23	4	3	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
24	4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
25	4	4	4	4	3	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
26	4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
27	4	4	3	3	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
28	4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
29	4	3	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
30	4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
31	4	3	4	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
32	4	4	4	4	4	4	3	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21
33	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	3	3	3	4	4	4	21

item_7	Pearson Correlation	,562**	,208	,418*	,372*	,000	,127	1	,265	,767**
	Sig. (2-tailed)	,001	,245	,016	,033	1,000	,480		,137	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_8	Pearson Correlation	,000	,223	,000	-,062	,169	,084	,265	1	,411*
	Sig. (2-tailed)	1,000	,213	1,000	,732	,347	,644	,137		,018
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
skor_ite m	Pearson Correlation	,608**	,456**	,532**	,546**	,425*	,377*	,767**	,411*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,008	,001	,001	,014	,031	,000	,018	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	33	100,0

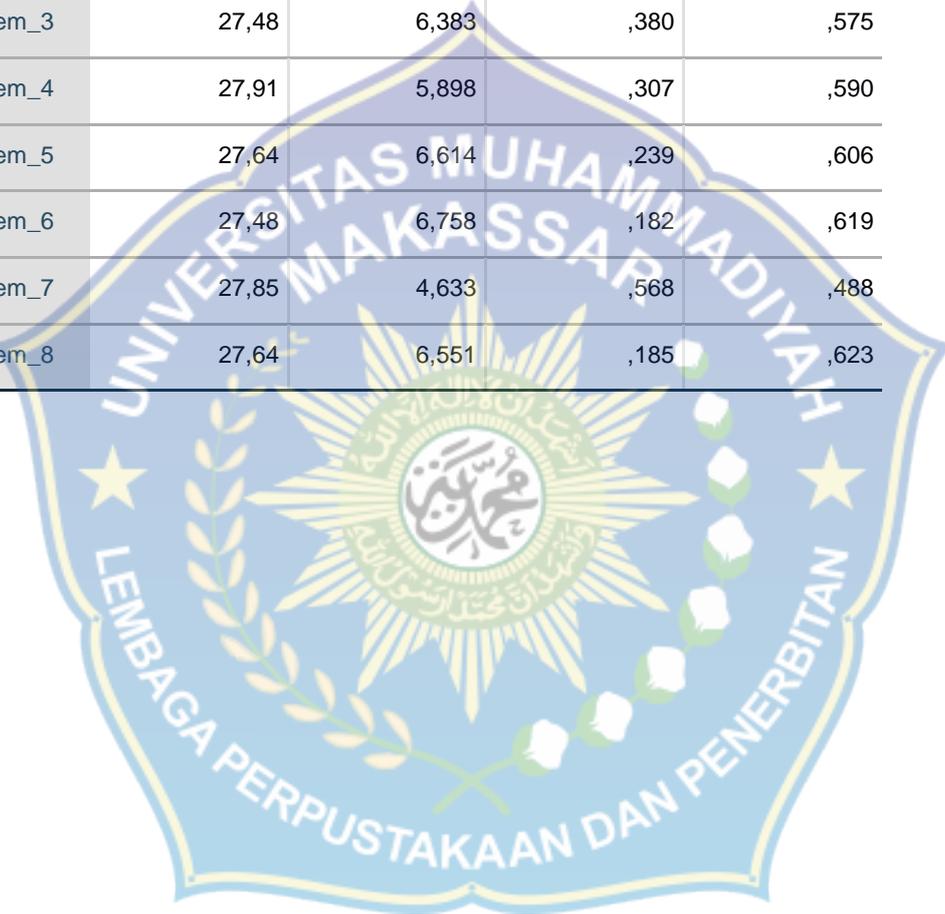
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

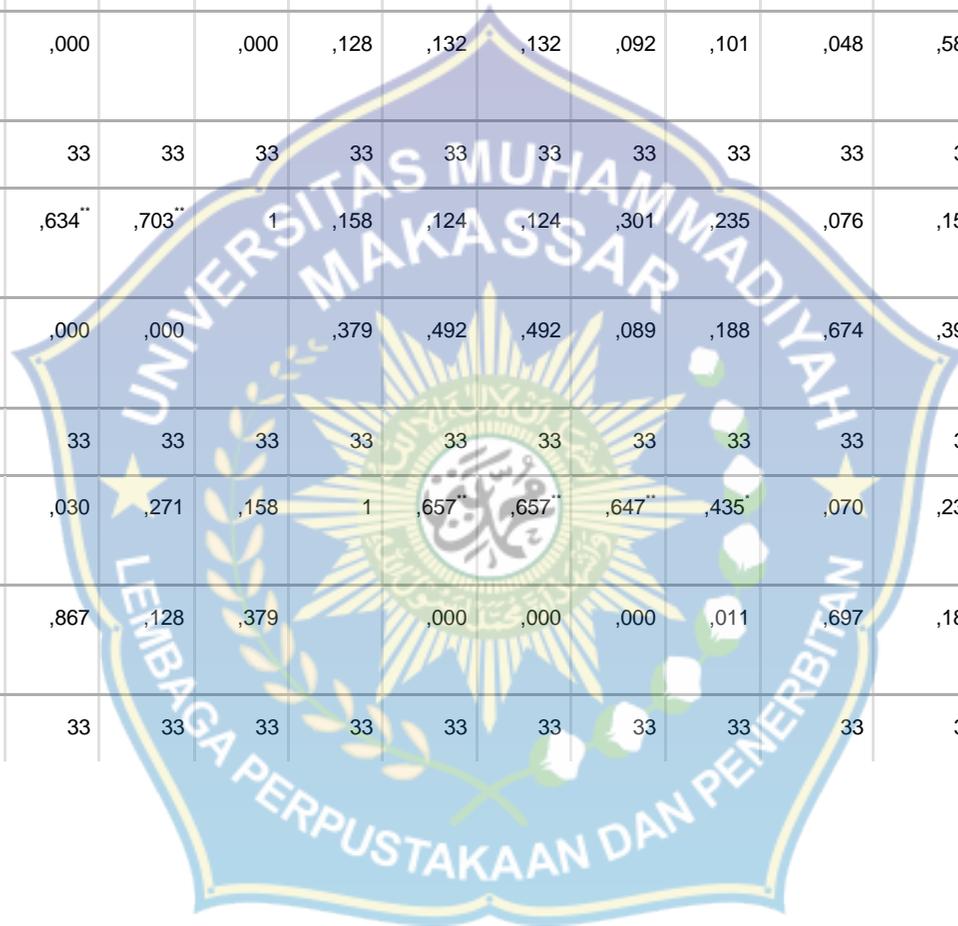
Cronbach's Alpha	N of Items
,619	8

Item-Total Statistics

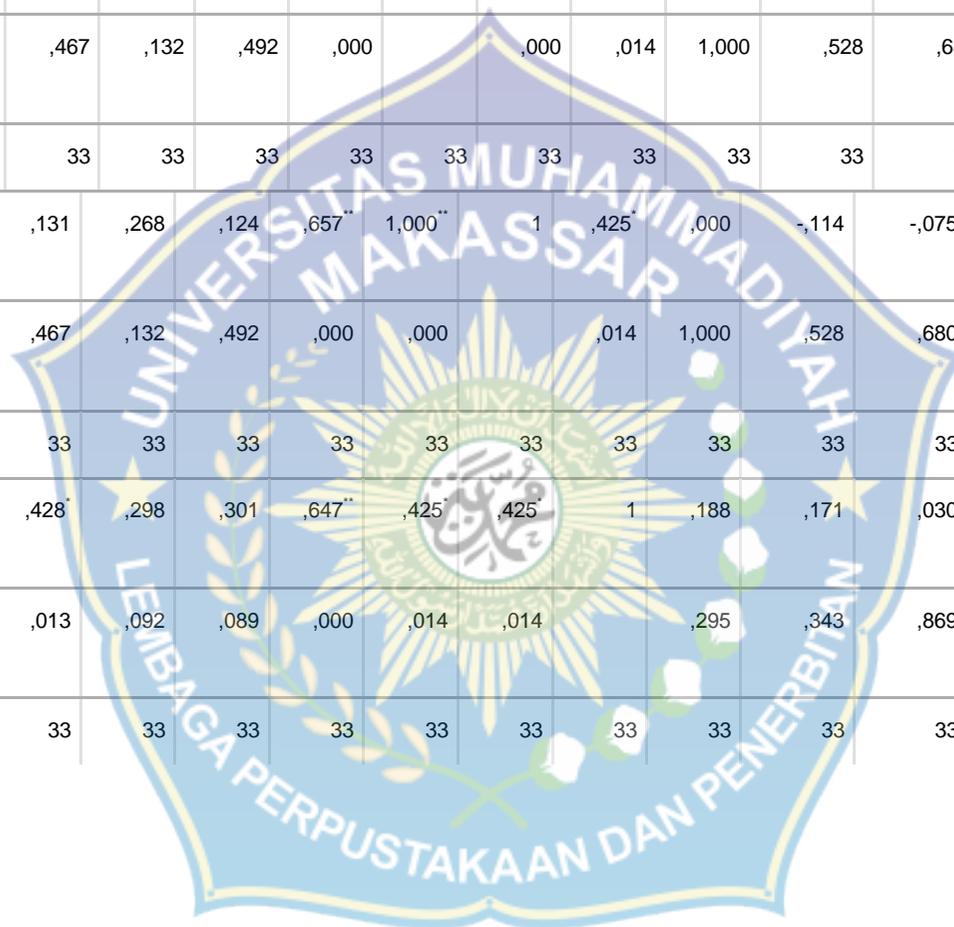
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	27,79	5,922	,435	,554
item_2	27,67	6,417	,245	,605
item_3	27,48	6,383	,380	,575
item_4	27,91	5,898	,307	,590
item_5	27,64	6,614	,239	,606
item_6	27,48	6,758	,182	,619
item_7	27,85	4,633	,568	,488
item_8	27,64	6,551	,185	,623



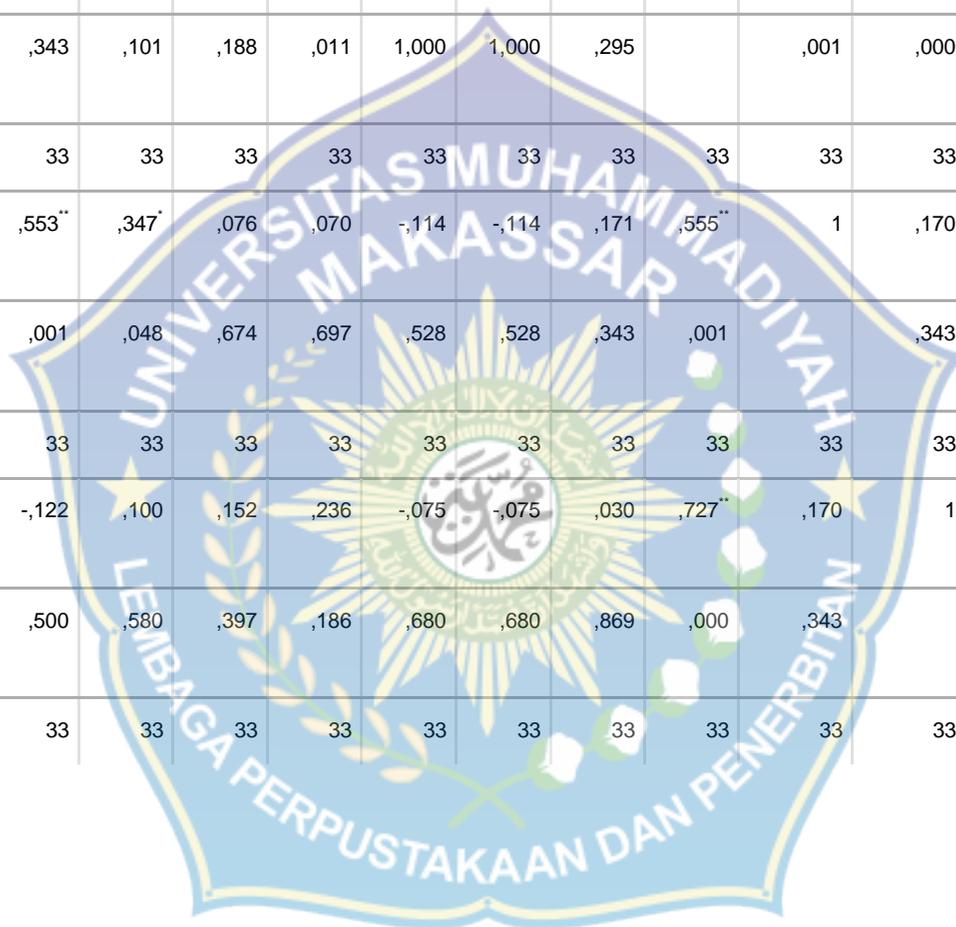
item_3	Pearson Correlation	,309	,643**	1	,703**	,271	,268	,268	,298	,291	,347*	,100	,659**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,081	,000		,000	,128	,132	,132	,092	,101	,048	,580	,000	,000
N		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_4	Pearson Correlation	,249	,634**	,703**	1	,158	,124	,124	,301	,235	,076	,152	,501**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,162	,000	,000		,379	,492	,492	,089	,188	,674	,397	,003	,000
N		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_5	Pearson Correlation	,154	,030	,271	,158	1	,657**	,657**	,647**	,435*	,070	,236	,219	,526**
	Sig. (2-tailed)	,392	,867	,128	,379		,000	,000	,000	,011	,697	,186	,221	,002
N		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33



item_6	Pearson Correlation	,117	,131	,268	,124	,657**	1	1,000**	,425*	,000	-,114	-,075	-,133	,372*
	Sig. (2-tailed)	,516	,467	,132	,492	,000	,000	,014	1,000	,528	,680	,461	,033	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_7	Pearson Correlation	,117	,131	,268	,124	,657**	1,000**	1	,425*	,000	-,114	-,075	-,133	,372*
	Sig. (2-tailed)	,516	,467	,132	,492	,000	,000	,014	1,000	,528	,680	,461	,033	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_8	Pearson Correlation	,531**	,428*	,298	,301	,647**	,425*	,425*	1	,188	,171	,030	,010	,573**
	Sig. (2-tailed)	,001	,013	,092	,089	,000	,014	,014	,295	,343	,869	,958	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33



item_9	Pearson Correlation	,354 [*]	,171	,291	,235	,435 [*]	,000	,000	,188	1	,555 ^{**}	,727 ^{**}	,656 ^{**}	,657 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,044	,343	,101	,188	,011	1,000	1,000	,295		,001	,000	,000	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_10	Pearson Correlation	,471 ^{**}	,553 ^{**}	,347 [*]	,076	,070	-,114	-,114	,171	,555 ^{**}	1	,170	,388 [*]	,582 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,006	,001	,048	,674	,697	,528	,528	,343	,001		,343	,026	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
item_11	Pearson Correlation	,309	-,122	,100	,152	,236	-,075	-,075	,030	,727 ^{**}	,170	1	,459 ^{**}	,397 [*]
	Sig. (2-tailed)	,081	,500	,580	,397	,186	,680	,680	,869	,000	,343		,007	,022
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33



item_12	Pearson Correlation	,000	,249	,659**	,501**	,219	-,133	-,133	,010	,656**	,388*	,459**	1	,608**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,163	,000	,003	,221	,461	,461	,958	,000	,026	,007		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
skor_item	Pearson Correlation	,637**	,731**	,781**	,660**	,526**	,372*	,372*	,573**	,657**	,582**	,397*	,608**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	,033	,033	,000	,000	,000	,022	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	33	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,811	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	45,64	12,176	,526	,791
item_2	45,45	10,756	,600	,785
item_3	45,24	12,064	,723	,776
item_4	45,39	12,059	,555	,788
item_5	45,52	13,570	,459	,801
item_6	45,39	13,746	,268	,811
item_7	45,39	13,746	,268	,811
item_8	45,55	13,256	,499	,797
item_9	45,64	12,801	,585	,790
item_10	45,76	12,314	,453	,798

item_11	45,70	13,530	,281	,811
item_12	45,33	11,792	,457	,801

c. Variabel Y

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	skor_item
item_1	Pearson Correlation	1	,571**	,769**	,228	,085	,572**	,844**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,202	,637	,001	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
item_2	Pearson Correlation	,571**	1	,412**	,067	-,054	,592**	,678**
	Sig. (2-tailed)	,001		,017	,711	,767	,000	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
item_3	Pearson Correlation	,769**	,412**	1	,055	-,140	,648**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000	,017		,762	,436	,000	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
item_4	Pearson Correlation	,228	,067	,055	1	,724**	,019	,467**
	Sig. (2-tailed)	,202	,711	,762		,000	,915	,006
	N	33	33	33	33	33	33	33
item_5	Pearson Correlation	,085	-,054	-,140	,724**	1	-,009	,355*
	Sig. (2-tailed)	,637	,767	,436	,000		,962	,043
	N	33	33	33	33	33	33	33
item_6	Pearson Correlation	,572**	,592**	,648**	,019	-,009	1	,773**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,915	,962		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
skor_it	Pearson Correlation	,844**	,678**	,750**	,467**	,355*	,773**	1

em	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,006	,043	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	33	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,727	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	18,79	2,797	,746	,604
item_2	18,82	3,153	,510	,676
item_3	18,82	2,778	,566	,654
item_4	18,27	3,705	,300	,729
item_5	18,42	3,814	,108	,784
item_6	18,09	2,710	,600	,642

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,607 ^a	,369	,327	1,70447

a. Predictors: (Constant), PI (X2), PTI (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50,905	2	25,452	8,761	,001 ^b
	Residual	87,156	30	2,905		
	Total	138,061	32			

a. Dependent Variable: KIP (Y)

b. Predictors: (Constant), PI (X2), PTI (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,070	4,845		2,285	,030
	PTI (X1)	-,158	,111	-,210	-1,432	,163
	PI (X2)	,326	,079	,604	4,110	,000

a. Dependent Variable: KIP (Y)

BIOGRAFI PENULIS



Aprini Aulia Amri lahir di Bulukumba pada tanggal 23 April 1998 dari pasangan suami istri Bapak Achmad Dua Pasau dan Ibu Ariyanti Malik. Peneliti adalah anak Pertama dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Talasalapang II.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 155 Center lulus tahun 2009, SMP Negeri 32 Bulukumba lulus tahun 2012, SMA Negeri 3 Bulukumba lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.